
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT PETANI MELALUI PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUNA

*Strategies in Alleviating Poverty among Farmers by Developing Plantation Commodities
in Muna Regency*

Wa Ode Zarmin Hidayat¹, Rina Oktaviani², dan A. Faroby Falatehan³

¹ Staff Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Muna, Prov Sulawesi Tenggara.
Email : mpdipb@hotmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
E-mail: oktavianirina1@gmail.com

³ Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
E-mail: f_falatehan@hotmail.com.

ABSTRACT

Muna Regency is one of the very potential regencies for the development of plantation subsector. Most people (74.20 % of the population) of Muna Regency work in the sector, but the poverty level in the region is also high. For this reason this study takes the following objectives: 1) to identify the condition of the poor farmers in the Muna Regency; 2) to identify the excellent commodities of each districts which have the role in the economy of Muna Regency; 3) to formulate a plan of poverty alleviation program at the farmer level by developing plantation commodities in Muna Regency. Metode analisis yang digunakan adalah: Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Kelayakan Finansial, dan Logical Frame Approach (LFA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Komoditas unggulan perkebunan yang berperan dalam perekonomian pedesaan di Kabupaten Muna relatif seragam. Komoditi jambu Mete muncul sebagai komoditas unggulan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Muna. 2) Komoditas kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao memiliki kinerja finansial yang masih layak untuk dikembangkan kerana memiliki NPV yang positif, Nilai BC Ratio masih memberikan keuntungan dan nilai IRR yang lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. 3) Strategi pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Muna adalah melalui kerjasama pemasaran produk dengan pedagang pengumpul desa yang perlu di tingkatkan.

Keywords: Strategy, Poverty Alleviation, Plantation Commodities

ABSTRAK

Kabupaten Muna adalah salah satu kabupaten yang sangat potensial untuk pengembangan subsektor perkebunan. Kebanyakan masyarakat (74,20% dari populasi) Kabupaten Muna bekerja di sektor ini, namun tingkat kemiskinan di wilayah ini juga cukup tinggi. Berdasarkan alasan tersebut penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengidentifikasi kondisi petani miskin di Kabupaten Muna; 2) untuk mengidentifikasi komoditas unggulan masing-masing kecamatan yang memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Muna; 3) untuk merumuskan rencana program pengentasan kemiskinan di tingkat petani dengan mengembangkan komoditas perkebunan di Kabupaten Muna. Metode analisis yang digunakan adalah: Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis Kelayakan Finansial, dan *Logical Frame Approach* (LFA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Komoditas unggulan perkebunan yang berperan dalam perekonomian pedesaan di Kabupaten Muna relatif seragam. Komoditi jambu Mete muncul sebagai komoditas unggulan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Muna. 2) Komoditas kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao memiliki kinerja finansial yang masih layak untuk dikembangkan kerana memiliki NPV yang positif, Nilai BC Ratio masih memberikan keuntungan dan nilai IRR yang lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. 3) Strategi pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Muna adalah melalui kerjasama pemasaran produk dengan pedagang pengumpul desa yang perlu di tingkatkan.

Kata kunci: Strategi, Penanggulangan Kemiskinan, Komoditas Perkebunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Muna merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sendiri, oleh dan untuk rakyat bersama-sama dengan pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek pemerataan ataupun aspek pertumbuhan yang berkeadilan.

Program dan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan belum mendapat perhatian yang lebih, sehingga

krisis yang melanda bangsa Indonesia, terasa lebih berat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin secara nasional termasuk di Kabupaten Muna.

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif rendah (0,1%) dan tingkat potensi pengembangan yang sangat rendah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 12 Kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Muna, Tahun 2004 – 2006 (Jiwa)

Tahun	Total Penduduk	Total Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2004	297.550	157.639	52,97
2005	300.498	159.289	53,01
2006	304.753	168.431	55,27

Sumber : BPS Kabupaten Muna (2006)

Pada Tabel 1 jumlah kemiskinan di Kabupaten Muna tahun 2006 sebanyak 168.431 jiwa atau 55,27 persen dari total penduduk sebanyak 304.753 jiwa yang tersebar di 29 kecamatan, 254 desa, 39 kelurahan dan satu unit permukiman transmigrasi. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak 159.289 jiwa atau 53,01 persen dari jumlah penduduk sebanyak 300.498 jiwa. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 157.639 jiwa atau 52,97 persen. Dengan demikian jumlah kemiskinan di Kabupaten Muna mengalami peningkatan sebesar 1,74 persen dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna, menuntut pemerintah daerah untuk segera menanggulangi kemiskinan tersebut. Kabupaten Muna merupakan daerah dengan potensi sumberdaya alam yang

sangat besar. Letak geografis yang strategis, kondisi tanah subur dan iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, merupakan modal utama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini potensi yang besar tersebut belum secara penuh dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat.

Sektor pertanian Kabupaten Muna memiliki potensi penting sebagai salah satu subyek pelaku ekonomi ditandai dengan 74,20 persen penduduk Kabupaten Muna bermatapencaharian sebagai petani. Kemajuan dan kemakmuran di suatu wilayah dapat dicirikan melalui kemakmuran petaninya. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah digambarkan oleh banyaknya rumahtangga tani miskin di daerah tersebut. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani pada umumnya

adalah: ketidakberdayaan, kemiskinan, rendahnya pendidikan dan rentan terhadap gejala perekonomian. Kondisi tersebut mengakibatkan beban sosial ekonomi masyarakat petani yang harus ditanggung begitu besar sehingga kemiskinan terus meningkat.

Perumusan Masalah

Secara umum, sebagian besar keluarga miskin bertempat tinggal di

perdesaan. Pada Tahun 2006 hasil pemetaan yang dilakukan di Kabupaten Muna oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, sebanyak 74,20 persen dari jumlah keluarga miskin Kabupaten Muna memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pola penyebaran penduduk miskin Kabupaten Muna menurut mata pencaharian pokok keluarga miskin dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Pokok Keluarga Miskin di Kabupaten Muna, Tahun 2006

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (KK)	Presentase
1.	Petani	27.871	74,20
2.	Nelayan	2.208	5,88
3.	Buruh	1.720	4,58
4.	Pengrajin	263	0,70
5.	Peternak	43	0,11
6.	Tukang Batu	209	0,56
7.	Jasa Angkutan	598	1,59
8.	Jasa Perdagangan	320	0,85
9.	Tukang Kayu	404	1,08
10.	Tidak bekerja	3.927	10,45

Sumber : BPS Kabupaten Muna (2006)

Pada Tabel 2 mata pencaharian pokok keluarga miskin Kabupaten Muna sebagai petani lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya, yaitu sebesar 27.871 KK atau 74,20 persen disusul pekerjaan pokok sebagai nelayan 2.208 KK atau 5,88 persen dan pekerjaan sebagai buruh adalah 1.720 KK atau 4,58 persen. Sedangkan pekerjaan pokok yang paling sedikit diminati oleh keluarga miskin Kabupaten Muna adalah peternak sebanyak 43 KK atau 0,11 persen dari seluruh jumlah keluarga miskin.

Mengingat kemiskinan lebih banyak dialami oleh rumahtangga tani, maka upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan petani. Potensi sumberdaya alam berupa produksi

perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Muna, harus dioptimalkan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana kondisi kemiskinan di tingkat petani di Kabupaten Muna?

Pada Tahun 2004, pemerintah pusat meluncurkan program khusus untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan masih berlanjut sampai sekarang. Program ini hanya ditujukan pada keluarga miskin di perkotaan sementara kemiskinan lebih banyak berada di perdesaan. Pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muna baru pada tahap memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat penanggulangan kemiskinan sementara, sehingga tidak menurunkan jumlah kemiskinan terutama di perdesaan. Pemahaman terhadap kondisi sosial

ekonomi masyarakat perdesaan dan produk utama wilayah tersebut menjadi bekal bagi penyusunan program pembangunan perdesaan yang terintegrasi. Oleh karena itu kajian atau analisis program pembangunan yang relevan untuk mengurangi kemiskinan perlu dilakukan. Hal ini mencakup penentuan jenis komoditas perkebunan yang akan dikembangkan pada setiap kecamatan, yang berperan dalam penyusunan rancangan strategi dan program pengentasan kemiskinan ditingkat petani untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Muna?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis komoditas-komoditas unggulan di masing-masing kecamatan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Muna.
2. Menyusun rancangan strategi program pengentasan kemiskinan ditingkat petani di Kabupaten Muna.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut absolut (Tambunan, 1996). Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Badan Pusat Statistik, 2002).

Berdasarkan indikator internasional seperti terdefinisi miskin dalam kategori *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah warga miskin yang berpendapatan dibawah satu dolar AS setiap harinya. Kemudian *Asian Development* menggunakan dasar garis kemiskinan yang

ditetapkan Bank Dunia sebesar US\$ 2 perkapita per hari, setelah dikonversi kedalam rupiah menjadi sekitar Rp 540.000 per bulan.

Menurut Nurkse (1953), ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin.

Sajogyo (1987), mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat didasarkan pada kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Sajogyo dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita.

Menurut Tambunan (1996), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan langsung maupun tidak langsung, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan substitusi, investasi, alokasi serta kualitas sumberdaya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik, hingga politik, bencana alam dan peperangan. Kalau diamati sebagai faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain.

Indikator Kemiskinan

Sajogyo (1987), mengungkapkan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah *headcount index*, yaitu menghitung jumlah

orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Meskipun *headcount index* ini sangat bermanfaat, namun sering dikritik karena mengabaikan jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan.

Kemiskinan dapat ditunjukkan oleh dua indikator. Pertama, *Human Poverty Index* (HPI), yang dilihat dari angka daya hidup (< 40 tahun), tingkat pendidikan dasar yang diukur berdasarkan persentase penduduk dewasa yang buta huruf dan hilangnya hak pendidikan perempuan, kriteria ekonomi. Kedua, kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi, sosial, politik dan fisik, yakni rendahnya pendapatan, hilangnya sumberdaya material, hilangnya kesempatan, hak berpendapat, ketidakberdayaan kekuasaan, dan ketidakmampuan mengelola aset.

Kuncoro (1997), mengatakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah *Headcount Index*, yaitu menghitung jumlah orang miskin seperti proporsi dari populasi. Meskipun *Headcount Index* ini sangat bermanfaat, namun sering dikritik karena mengabaikan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Seperti menurut *Indonesia Nutrition Network* (INN) tahun 2003 adalah Rp 96.956 untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk perdesaan. Kemudian Menteri Sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkan adalah penduduknya adalah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah Rp 150.000 per bulan. Bahkan Bappenas menetapkan batas kemiskinan yakni keluarga yang memiliki penghasilan dibawah Rp 180.000 per bulan.

Hendrakusumaatmaja (2002), mengungkapkan bahwa kemiskinan dicirikan oleh tiga hal yaitu, pertama rendahnya penguasaan aset dimana skala usaha tidak efisien dan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Kedua, rendahnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan atau

penguasaan aset. Ketiga, rendahnya kemampuan dalam mengelola aset.

Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2002), menjelaskan bahwa beberapa strategi yang dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah melalui kebijakan makro ekonomi, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan makroekonomi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Strategi menanggulangi kemiskinan yang dilakukan melalui pendekatan pemenuhan hak-hak dasar adalah dengan pemenuhan hak atas pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi, kegiatan usaha produktif, perumahan, air bersih dan rasa aman.

Menurut Suharto (2003), dalam upaya mengatasi kemiskinan diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan program kebijakan dan program anti kemiskinan. Sayangnya hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernization paradigm*) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik (*orthodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*production-centerel model*). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai menjadi indikator pembangunan Tahun 1950-an, misalnya para ahli ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakalah berbicara masalah kemiskinan di satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh

perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan.

Pembangunan Perdesaan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan perdesaan menurut rumusan Bank Dunia, merupakan suatu strategi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi lapisan masyarakat tertentu, masyarakat perdesaan yang miskin dan melibatkan secara luas manfaat dari pola pembangunan untuk kelompok termiskin diantaranya mereka yang mencari nafkah di perdesaan (Alala, 1992). Khususnya dalam kaitannya dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, PBB lebih menekankan pada proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberikan kesempatan secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa (Conyers, 1987). Oleh karena pembangunan perdesaan merupakan suatu strategi yang dicanangkan guna memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi golongan miskin maka usaha untuk pemerataan pendapatan dituntut adanya perbaikan kelembagaan (Juoro, 1985).

Berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan masyarakat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalan desa dari kota, tidak terakomodasinya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam program-program pemerintah dan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masih rendah (Hernowo, 2003).

Ndraha (1987), mengatakan bahwa strategi pembangunan perdesaan adalah peningkatan kapasitas dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam setiap tahap proses

pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal, yang membedakannya dari pembangunan lainnya. Menurut Saharia (2003), terdapat paradigma baru dalam pembangunan perdesaan, dimana pertanian diposisikan sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan hasil memadai. Pertanian dapat menjadi sumber pendapatan yang memadai apabila setiap program melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang ada di wilayah perdesaan (sekitar 75 %) dari total penduduk dan tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dalam hal ini potensi sumberdaya manusianya dan potensi sumberdaya alamnya.

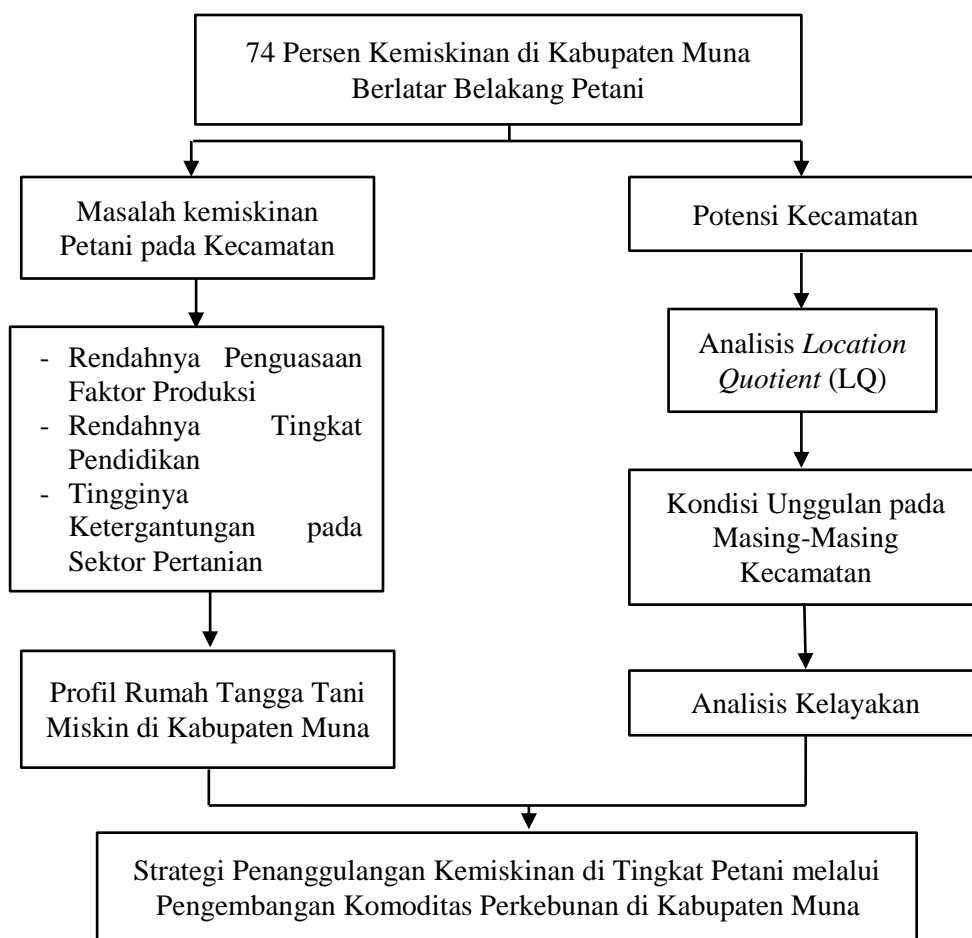
Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi di perdesaan, bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Potensi desa dan masyarakat harus dikembangkan. Demikian pula untuk memahami masalah kemiskinan di Kabupaten Muna, diperlukan kajian mengenai potensi masing-masing Kecamatan agar dapat menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat.

Kajian ini melihat dari tiga sisi dalam menemukan strategi pembangunan perdesaan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan perdesaan. Sisi pertama adalah mencari penyebab kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan di perdesaan terkait dengan masalah kepemilikan faktor produksi, rendahnya tingkat pendidikan dan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Sisi kedua adalah perlunya ditemukan potensi kecamatan berupa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Muna. Sisi ketiga adalah analisis finansial untuk melihat kelayakan usahatani komoditi perkebunan. Pengembangan komoditas perkebunan di perdesaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Melalui identifikasi dan

analisis mengenai potensi komoditas perkebunan dan analisis kelayakan di kecamatan tersebut dapat dirumuskan strategi pembangunan perdesaan yang tepat. Strategi pembangunan perdesaan yang pro bagi pengentasan kemiskinan dan bukan semata-mata lebih menguntungkan orang kota. Bukan pembangunan perdesaan yang lebih mengutamakan

perbaikan fisik semata dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pembangunan perdesaan yang mampu memberdayakan potensi desa dan masyarakat desa di setiap kecamatan. Strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam rancangan program strategi pembangunan perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi kajian ini bertempat di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sasaran kajian adalah keluarga miskin dengan menggunakan metode *purposive sampling* (berstatus miskin). Pemilihan ini dilaksanakan karena Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kajian ini dilaksanakan dari

bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2008.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah luas lahan perkebunan, produksi perkebunan, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk miskin tahun 2004-2006, jumlah rumah tangga tani miskin tahun 2006. Sumber data diperoleh dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muna.

Tabel 3. Rancangan Kajian untuk Membahas Tujuan

No	Karakteristik Data	Jenis Data Yang Diperlukan	Metode Analisis
1.	Mengidentifikasi kondisi petani miskin di Kabupaten Muna	Jumlah penduduk/ keluarga miskin tiap kecamatan.	Deskriptif
2.	Mengidentifikasi komoditi perkebunan di masing-masing kecamatan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian perdesaan Kabupaten Muna	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Areal dan Jumlah Produksi • Usahatani komoditi perkebunan 	LQ NPV
3.	Menyusun rancangan strategi program pengentasan kemiskinan di tingkat petani melalui pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Muna		Deskriptif

Metode Analisis

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan dalam ekonomi geografi terutama di tingkat kecamatan. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Nilai LQ merupakan indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah atau dapat dikatakan bahwa LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis LQ adalah: (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola aktivitas bersifat seragam, (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang seragam.

Analisis dengan model LQ ini digunakan untuk melihat sektor basis atau bukan basis dari suatu wilayah perencanaan dan dapat mengidentifikasi sektor unggulan atau keunggulan

komperatif suatu wilayah. Pendekatan dengan metode Analisis LQ ini menggunakan data produksi dan luas areal. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_j / X..}$$

dimana:

- LQ_{ij} = Indeks kuosien lokasi kecamatan i untuk komoditi j
- X_{ij} = Jumlah produksi/luas areal masing-masing komoditi j di kec. i
- X_i = Jumlah produksi/luas areal total perkebunan di Kecamatan i
- X_j = Jumlah produksi/luas areal total komoditi j di Kabupaten Muna
- $X..$ = Jumlah produksi/luas areal total seluruh komoditi perkebunan Wilayah Kabupaten Muna

Kriteria penilaian dan penentuan ukuran derajat basis dan non basis adalah nilai LQ lebih besar atau sama dengan satu ($LQ \geq 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan apabila nilainya kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor yang dimasukkan termasuk ke dalam sektor bukan basis pada kegiatan perekonomian wilayah Kabupaten Muna.

Analisis Kelayakan Finansial



Untuk mengetahui kriteria penilaian kelayakan investasi usahatani komoditi kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao dilakukan dengan metode *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan *benefit cost ratio* (B/C) ratio.

1. *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value (NPV) atau nilai tambah adalah nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penawaran investasi. Metode ini menghitung selisih antara manfaat (penerimaan) dengan biaya (pengeluaran). Perhitungan ini diukur dengan nilai uang sekarang (*present value*) dengan rumus:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

dimana:

- B_t = penerimaan kotor dari komoditi kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao pada tahun t
- C_t = biaya kotor dari komoditi kelapa, kopi, jambu mete, kemiri, dan coklat/kakao pada tahun t
- n = umur ekonomis
- i = *discount rate*

Kriteria yang digunakan adalah apabila: a) nilai NPV > 0, maka pengembangan komoditas layak untuk diusahakan; b) nilai NPV < 0, maka pengembangan komoditas tidak layak untuk diusahakan; dan c) nilai NPV = 0, maka pengembangan komoditas mencapai *break even point* (Gitinger, 1986).

2. *Internal Rate Return* (IRR)

Menurut Gitinger (1986) *Internal Rate Return* (IRR) adalah suatu tingkatan bunga yang menunjukkan nilai sekarang netto (NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan kata lain tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan nol (NPV=0). IRR adalah i^* . Perhitungan IRR dengan rumus:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i^*)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i^*)^t}$$

Tingkat bunga tersebut merupakan tingkat bunga maksimal yang dapat dibayar oleh proyek untuk faktor produksi yang digunakan. Perhitungan IRR ditulis dengan rumus Gitinger (1986):

$$IRR = r^+ \frac{NPV^+}{NPV^+ - NPV^-} (i^+ - i^-)$$

dimana:

- i^+ = Nilai Percobaan pertama untuk *discount rate*
- i^- = Nilai Percobaan kedua untuk *discount rate*
- NPV^+ = Nilai Percobaan pertama untuk *discount rate*
- NPV^- = Nilai Percobaan kedua untuk *discount rate*

Kriteria yang digunakan adalah apabila: a) nilai IRR > i , maka pengembangan komoditas layak untuk diusahakan; b) nilai IRR < i , maka pengembangan komoditas tidak layak untuk diusahakan; dan c) nilai NPV = i , maka pengembangan komoditas mencapai *break even point* pada tingkat suku bunga tabungan 12 persen dan suku bunga pinjaman 18 persen.

3. *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C)

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) adalah nilai perbandingan antara nilai manfaat bersih dengan biaya bersih yang diperhitungkan nilainya saat ini. Net B/C menggunakan rumus :

$$NetB/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t - B_t}{(1+i)^t}} \dots \dots \frac{\text{untuk } B_t \langle C_t}{\text{untuk } B_t \langle C_t}$$

dimana :

- B_t = penerimaan kotor dari komoditi kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao pada tahun t

C_t = biaya kotor dari komoditi kelapa, kopi, jambu mete, kemiri, dan coklat/kakao pada tahun t

n = umur ekonomis

i = *discount rate*

Kriteria yang digunakan adalah apabila $Net\ B/C > 1$, maka kegiatan pengembangan komoditas perkebunan yang digunakan menguntungkan karena penerima lebih besar dari pada biaya total dan sebaliknya.

Metode Perancangan Program

Dalam penyusunan rancangan program, perlu terlebih dahulu dianalisis dan ditetapkan masalah prioritas. Setelah itu ditetapkan suatu strategi pengembangan dan penanggulangan, selanjutnya disusun rancangan program untuk direkomendasikan kepada pihak terkait. Perancangan program dimaksud dilakukan dengan metode *Logical Frame Approach* (LFA).

Pemilihan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa metode ini bisa digunakan untuk menganalisis masalah yang diawali dengan menentukan masalah pokok dan menentukan masalah prioritas. Dalam hal ini metode LFA lebih aplikatif untuk dilaksanakan dalam upaya mengatasi dampak yang timbul dan mampu mengakomodir sebagian keinginan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Basis Ekonomi Berdasarkan Hasil Produksi dan Luas Areal Perkebunan

Hasil *Location Quotient Analysis* yang menggambarkan keunggulan komparatif berbagai komoditi unggulan masing-masing kecamatan yang berperan dalam perekonomian di Kabupaten Muna disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa komoditas kelapa dapat dikembangkan di Kecamatan Tikep, Maginti, Batalaiworu, Napabalano, Lasalepa, Wakorsel, Pasir

Putih, Bonegunu, Kambowa, Maligano, Kulisusu dan Kulisusu Barat. Kecamatan Katobu juga dapat dikembangkan komoditi kelapa walaupun LQ lebih besar namun hanya merupakan komoditi sela. Komoditas kelapa dapat dikembangkan di Kulisusu Utara dan merupakan sektor basis bagi perekonomian masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai $LQ > 1$ dan memiliki nilai LQ tertinggi dari komoditas lainnya pada kecamatan tersebut. Komoditas kopi direkomendasikan dikembangkan di Kecamatan Parigi, Bone, Kabawo, Kabangka, Tikep, Lawa, Wakorumba dan Maligano. Komoditas kopi dapat dikembangkan di Kecamatan Kabangka karena memiliki nilai LQ kopi terbesar diantara komoditas lainnya yaitu 14,26 dan merupakan komoditas basis bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Kabangka. Komoditi Kopi di Kecamatan Kabangka dengan demikian mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Komoditas jambu mete layak dikembangkan pada Kecamatan Lohia, Duruka dan Batalaiworu karena merupakan sektor basis dan memiliki LQ terbesar diantara komoditas lainnya. Pada Kecamatan Napabalano, Lasalepa, Wakorumba, Maligano dan Kulisusu kelapa juga layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai $LQ > 1$. Usaha perkebunan jambu mete juga dapat dikembangkan di Kecamatan Tongkuno karena merupakan komoditas basis yang ditunjukkan oleh nilai $LQ > 1$, walaupun nilai LQ tertinggi adalah komoditas kemiri tetapi komoditas tersebut merupakan tanaman sela pada perkebunan jambu mete di Kecamatan Tongkuno. Perkebunan jambu mete selain sebagai tanaman utama, juga berfungsi sebagai komoditi pelindung untuk usahatani komoditi lainnya. Hal ini dapat lebih memotivasi petani untuk melakukan diversifikasi usahatani sehingga apabila harga komoditas tertentu jatuh masih ada komoditas lainnya sebagai penyangga. Pada akhirnya petani dapat lebih meningkatkan pendapatannya.

Tabel. 4. Indeks *Location Quotient* Berdasarkan Produksi Unit Usaha Tanaman Perkebunan di Kabupaten Muna, Tahun 2007

Kecamatan	Kelapa	Kopi	Jambu Mete	Kemiri	Coklat/Kakao
1. Tongkuno	0,15	0,46	1,66	1,90	0,07
2. Parigi	1,61	3,15	0,74	1,44	0,50
3. Bone	0,73	3,00	1,20	5,47	0,07
4. Kabawo	0,32	4,08	1,25	5,49	0,65
5. Kabangka	0,49	14,26	0,65	2,00	2,01
6. Tikep	1,72	1,20	0,35	9,35	1,27
7. Maginti	0,57	0,96	0,13	0,80	5,50
8. Tiworo Tengah	1,07	-	1,02	0,32	0,95
9 Lawa	0,08	2,39	1,59	1,45	0,32
10. Sawerigadi	0,88	0,64	0,89	2,14	1,63
11. Barangka	0,77	0,35	0,91	1,59	1,88
12. Kusambi	0,86	0,07	1,19	1,50	0,57
13. Kontunaga	0,59	0,15	1,40	2,36	0,18
14. Watopute	0,63	0,23	1,38	2,37	0,17
15. Katobu	3,09	-	0,08	-	0,55
16. Lohia	0,17	0,14	1,70	0,12	0,06
17. Duruka	0,01	0,14	1,79	0,12	0,03
18. Batalaiworu	0,21	-	1,70	0,07	0,01
19. Napabalano	0,70	0,03	1,37	0,10	0,34
20. Lasalepa	0,70	0,02	1,41	-	0,18
21. Wakorsel	1,79	-	0,42	0,91	1,83
22. Pasir Putih	1,93	-	0,37	0,56	1,77
23. Bonegunu	1,63	0,04	0,87	0,11	0,39
24. Kambowa	1,83	-	0,76	-	0,42
25. Wakorumba	0,73	1,95	1,09	0,43	1,16
26. Maligano	0,66	2,05	1,02	0,11	1,61
27. Kulisusu	0,90	0,14	1,18	0,43	0,62
28. Kulisusu Barat	2,26	0,28	0,36	0,32	1,09
29. Kulisusu Utara	2,59	0,25	0,13	-	1,36

Komoditi kemiri dapat dikembangkan di Kecamatan Bone dan Kabawo karena komoditas kemiri menjadi sektor basis pada kedua kecamatan tersebut dan memiliki nilai LQ tertinggi dibandingkan komoditas lainnya pada kecamatan tersebut. Disamping itu komoditas kemiri dapat dikembangkan di Kecamatan Tikep karena memiliki nilai LQ sebesar 9,35 dan merupakan komoditi basis bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Tikep. Oleh karena itu pengembangan komoditas kemiri perlu diarahkan pada ketiga kecamatan tersebut. Dengan demikian mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Muna.

Komoditas coklat/kakao dapat dikembangkan di Kecamatan Maginti karena memiliki nilai LQ terbesar diantara komoditas lainnya yaitu 5,50 dan merupakan komoditi basis bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Maginti. Komoditi coklat/kakao di Kecamatan Maginti dengan demikian mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Muna.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa komoditas kelapa dapat dikembangkan di Kecamatan Tikep, Maginti, Batalaiworu, Napabalano dan Lasalepa karena merupakan sektor basis bagi perekonomian masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai LQ > 1 dan paling tinggi LQ komoditas

lainnya pada kecamatan tersebut. Oleh karena itu pengembangan komoditas

kelapa perlu diarahkan pada ketiga kecamatan tersebut.

Tabel 5. Indeks *Location Quotient* Berdasarkan Luas Areal Komoditi Perkebunan di Kabupaten Muna, Tahun 2007

Kecamatan	Kelapa	Kopi	Jambu Mete	Kemiri	Coklat/Kakao
1. Tongkuno	0,44	0,87	1,27	3,09	0,13
2. Parigi	0,89	1,03	1,12	0,76	0,50
3. Bone	0,25	0,62	1,36	0,77	0,05
4. Kabawo	0,12	1,21	1,32	0,58	0,32
5. Kabangka	0,26	2,80	0,92	0,56	2,04
6. Tikep	1,92	1,49	0,51	5,09	2,24
7. Maginti	1,29	1,15	0,41	0,48	3,77
8. Tiworo Tengah	1,06	0,78	0,88	0,44	1,62
9 Lawa	0,21	2,35	1,28	1,51	0,24
10. Sawerigadi	0,39	1,18	1,23	0,55	0,49
11. Barangka	0,32	0,73	1,24	0,45	0,56
12. Kusambi	0,39	0,13	1,19	0,66	0,84
13. Kontunaga	0,58	0,66	1,21	2,01	0,34
14. Watopute	0,50	1,00	1,24	1,44	0,28
15. Katobu	5,54	-	0,12	-	0,63
16. Lohia	0,79	0,27	1,22	0,14	0,20
17. Duruka	0,19	1,52	1,28	1,58	0,37
18. Batalaiworu	1,67	0,52	1,01	2,59	0,17
19. Napabalano	1,10	0,14	1,14	0,21	0,33
20. Lasalepa	1,05	0,09	1,18	0,09	0,20
21. Wakorsel	2,33	-	0,80	1,01	0,67
22. Pasir Putih	1,63	-	0,91	0,63	0,89
23. Bonegunu	1,86	0,20	0,87	0,11	0,87
24. Kambowa	1,97	0,10	0,85	-	0,88
25. Wakorumba	1,08	2,36	0,86	0,25	1,50
26. Maligano	1,10	2,89	0,78	0,41	1,81
27. Kulisusu	1,23	0,34	0,86	0,47	1,59
28. Kulisusu Barat	2,59	0,80	0,46	0,54	2,07
29. Kulisusu Utara	2,61	0,41	0,43	0,74	2,23

Sumber :

Komoditas kopi menjadi basis bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Kabangka sebagaimana ditunjukkan oleh nilai $LQ > 1$ dan memiliki nilai LQ tertinggi bila dibandingkan dengan komoditas lainnya yang ada pada kecamatan tersebut. Oleh karena itu pengembangan komoditi kopi perlu diarahkan pada Kecamatan Kabangka.

Komoditas jambu mete dapat dikembangkan di Kecamatan Lohia dan Batalaiworu merupakan sektor basis yang ditunjukkan nilai $LQ > 1$, walaupun nilai LQ tertinggi pada Kecamatan Duruka adalah jambu mete merupakan sela pada

perkebunan kelapa di kecamatan tersebut. Di Kecamatan Tongkuno juga dapat dikembangkan komoditi jambu mete dan menjadi sektor basis walaupun nilai LQ tertinggi adalah komoditi kemiri, namun hanya merupakan tanaman sela pada tanaman jambu mete di Kecamatan Tongkuno.

Komoditas kemiri dapat dikembangkan di Kecamatan Bone dan Lohia, karena komoditas kemiri menjadi sektor basis pada kedua kecamatan tersebut dan memiliki nilai LQ tertinggi dibandingkan komoditas lainnya pada kecamatan tersebut. Disamping itu

komoditas kemiri dapat dikembangkan di Kecamatan Tikep karena memiliki nilai LQ sebesar 5,09 dan merupakan sektor basis bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Tikep.

Komoditas coklat/kakao menjadi sektor basis dapat dikembangkan di Kecamatan Maginti dan Kecamatan Kabangka sebagaimana ditunjukkan oleh nilai LQ > 1 dan memiliki nilai LQ tertinggi bila dibandingkan dengan dengan komoditas coklat/kakao lainnya pada kecamatan tersebut.

Analisis Kelayakan Finansial Perkebunan di Kabupaten Muna

Berdasarkan Tabel 6 memperlihatkan bahwa komoditi perkebunan kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao layak untuk diusahakan karena nilai *Net Present Value* (NPV) masih menguntungkan dengan tingkat suku bunga tabungan sebesar 12 persen yang berlaku dilokasi kajian.

Tabel 6. Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Perkebunan di Kabupaten Muna

Komoditi	Indikator	Analisis Finansial DF 12 %	Keterangan
Kelapa	NPV	Rp 559.417,29	Layak untuk dikembangkan
	Net B/C	Rp 0,91	
	IRR	15,97%	
Kopi	NPV	Rp 528.683,97	Layak untuk dikembangkan
	Net B/C	Rp 0,89	
	IRR	15,76%	
Jambu mete	NPV	Rp 2.886.725,48	Layak untuk dikembangkan
	Net B/C	Rp 2,14	
	IRR	27,87%	
Kemiri	NPV	Rp 484.836,65	Layak untuk dikembangkan
	Net B/C	Rp0,87	
	IRR	15,48%	
Coklat/kakao	NPV	Rp 450.544,68	Layak untuk dikembangkan
	Net B/C	Rp0,85	
	IRR	15,25%	

Komoditas kelapa memiliki kinerja finansial yang masih layak untuk dikembangkan karena memiliki NPV Rp 559.417,29, nilai BC Ratio 0,91 yang masih memberikan keuntungan dan nilai IRRnya 15,97 persen lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. Komoditas kopi masih layak untuk dikembangkan karena memiliki NPV Rp 528.683,97, nilai BC Ratio 0,89 yang masih memberikan keuntungan dan nilai IRRnya 15,76 persen lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. Komoditas jambu mete layak untuk dikembangkan karena memiliki NPV Rp 2.886.725,48, nilai BC Ratio 2,14 yang memberikan keuntungan besar dan nilai IRRnya 27,87 persen lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. Komoditas kemiri

masih layak untuk dikembangkan karena memiliki NPV Rp 484.836,65, nilai BC Ratio 0,87 yang masih memberikan keuntungan dan nilai IRRnya 15,48 persen lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. Komoditas coklat/kakao masih layak untuk dikembangkan karena memiliki NPV Rp 450.544,68, nilai BC Ratio 0,85 yang masih memberikan keuntungan dan nilai IRRnya 15,25 persen lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank.

Rancangan Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Petani Melalui Pengembangan Komoditas Perkebunan

Pengembangan potensi perkebunan berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur pemberdayaan masyarakat sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi petani, secara langsung harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan hasil kajian ini maka rancangan program strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat petani melalui pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Muna adalah:

1. Program Kemitraan Pemasaran Produk

Melakukan kemitraan pemasaran dengan pihak industri pengolahan kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan yang dimaksud semacam PIR industri pengolahan. Jadi disamping petani sebagai pemasok bahan baku juga sebagai pemegang saham sehingga petani dapat menikmati nilai tambah yang diperoleh dari industri pengolahan. Saham petani dapat berupa pemberian sertifikat lahan secara kolektif dan digunakan sebagai agunan ke bank untuk memperoleh dana pembuatan dan operasional pabrik pengolahan kepala, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao pola PIR tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah Kabupaten Muna diharapkan dapat mengundang investor baru untuk mendirikan industri pengolahan kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao yang dapat bermitra dengan petani setempat.

2. Program Peningkatan SDM Petani

Peningkatan SDM petani adalah mewujudkan petani andal yang mandiri dalam mengelola usaha perkebunan. Program peningkatan usaha perkebunan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan pengelolaan komoditas pertanian dan pelatihan pada masyarakat petani dan aparat Pemda tentang pemanfaatan lahan serta tetap melakukan pendampingan petani dalam mengolah usaha perkebunan

dari instansi yang terkait agar teknologi yang ada dapat ditingkatkan, sehingga petani mampu menguasai teknologi sistem pemeliharaan dan mengembangkan perkebunan dan pemanfaatan lahan menjadi lahan yang produktif.

Memberikan wawasan dan keterampilan petani dalam meningkatkan usaha produk sampingan, seperti menggunakan lahan pekarangan lahan yang tidak tergarap menjadi lahan yang produktif serta melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berorientasi pasar.

3. Program Input Produksi (Bibit/ Benih)

Kurangnya ketersediaan peralatan dan input produksi (bibit/benih) yang masih terbatas serta keadaan petani yang masih tradisional menyebabkan mutu hasil perkebunan yang dicapai juga rendah. Pemberian input produksi (bibit/benih) tanaman perkebunan kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan.

Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan bibit/benih unggul dari instansi terkait. Kondisi ini memerlukan kerjasama dari pemerintah pengusaha (pedagang) dan petani perkebunan itu sendiri untuk meningkatkan hasil perkebunan yang baik sehingga keuntungan dapat dicapai oleh semua pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Komoditas unggulan perkebunan yang berperan dalam perekonomian perdesaan di Kabupaten Muna relatif seragam. Komoditi jambu Mete muncul sebagai komoditas unggulan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Muna.
2. Komoditas kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao memiliki kinerja finansial yang masih layak

untuk dikembangkan kerana memiliki NPV yang positif, Nilai BC Ratio masih memberikan keuntungan dan nilai IRR yang lebih tinggi dari suku bunga tabungan di bank. Namun kelayakan usahatani kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga bank, karena nilai NPV yang diperoleh relatif kecil dan nilai IRRnya hanya selisih sedikit dengan tingkat suku bunga tabungan yang berlaku di lokasi kajian.

3. Strategi pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Muna adalah melalui kerjasama pemasaran produk dengan pedagang pengumpul desa yang perlu ditingkatkan. Peningkatan sumber daya petani melalui pelatihan dan penyuluhan juga perlu dilakukan. Peningkatan luas areal usahatani perkebunan 2 hektar per KK. Strategi selanjutnya adalah pengembangan agribisnis kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao melalui pemberian bantuan input produksi (bibit/benih).

Saran

1. Perlu dirancang suatu program dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan coklat/kakao dengan melibatkan para *stakeholders* dalam pengembangan agribisnis komoditas perkebunan. Program yang dimaksud disini adalah adanya suatu program yang melibatkan keterkaitan antara petani, pengusaha dan pemerintah.
2. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam beberapa komoditas basis untuk penentuan kelayakan investasi komoditas tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alala. 1992. Masalah Kebijakan dan Peranan Institut Pedesaan: Sebuah Kajian Kritis, Media Baru 1(2), 23-25.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna 2006. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Muna Tahun 2006-2008.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muna 2006. Profil Kemiskinan Kabupaten Muna Tahun 2002-2006.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Tahun 2006-2008
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna 2006. Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Muna Tahun 2006-2009.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2006.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna 2006. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Muna 2006-2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna 2006. Kabupaten Muna Dalam Angka 2005/2006.
- Badan Pusat Statistik 2002. Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Conyers, D. 1987. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Gitinger. J.P. 1982, *Economic Analysis of Agriculture Project 2nd Completely Revised and Expanded*, UI-Press.
- Hendrakusumaatmaja, Sutara, 2002. *Pembangunan Ekonomi Lokal dan Regional*, IPB, Bogor.
- Hernowo, 2003. *Pengembangan Sumberdaya Lahan di Perdesaan*, Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas.
- Juoro, Umar, 1985. *Masalah Terdepan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ndraha, T., 1997. *Metodologi Pembangunan Desa*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- _____., 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Nurkse, Ragnar, 1953. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, <http://www.kimpraswil.go.id/publik/p2kp/des/memahami99.htm>
- Saharia, 2003. "Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal" Makalah Individu. Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Program Pascasarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. <http://rudyet.tripod.com/seml/023/sandra.htm>.
- Sayogyo, 1987. *Ekologi Pedesaan, Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharto, Edi, 2003. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, <http://www.immugm.org/public.html.article.php?story=20030911194808123>.
- Tambunan, Tulus T.H., 1996. *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia.

